

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMITMEN ORGANISASI, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

SANUSI
PADLAH RIYADI

Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, Indonesia
padlah.riyadi@gmail.com

Abstract: The aim of the research is to test and provide empirical evidence of the influence of village officials' competence, community participation, organizational commitment and transparency on the accountability of village fund management. This research was conducted using a sample determination method, namely purposive sampling, with a quantitative research type. Data analysis was carried out using a multiple regression analysis model. Hypothesis testing was carried out to determine the extent of influence of village apparatus competence, community participation, organizational commitment and transparency on accountability in managing village funds, either partially or simultaneously. The results of hypothesis testing show that the competence of village officials has no effect on the accountability of village fund management, while community participation, organizational commitment and transparency have a positive effect on the accountability of village fund management.

Keywords: Competence, community participation, organizational commitment, transparency, accountability for village fund management

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling, dengan jenis penelitian kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, baik secara parsial maupun simultan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Kompetensi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia. Desa menjadi salah satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar pula. Ismail (2016), menyatakan bahwa Negara sendiri harus mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Dalam hal ini desa sangat di istimewakan oleh pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBN dan APBD seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No.6 Thn 2014 tentang desa).

Tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi kebijakan regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi

bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketika perangkat desa tidak siap, maka dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa akan mengalami keterlambatan dan kesalahan dalam penyusunan. Penyimpangan lainnya seperti ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang dilakukan mengenai pertanggungjawaban dana desa, Rencana penggunaan desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa, akan tetapi tidak dilaksanakan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam pengelolaanya untuk memenuhi akuntabilitas pelaporan dari penggunaan dana desa harus memenuhi beberapa prinsip dasar penyajian laporan keuangan yang mudah difahami, andal, dan relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan (Liwier, 2016).

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang besar memerlukan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Menurut Syafaruddin (2019), pemanfaatan alokasi dana desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari masalah pengelolaan keuangan

desa. Kelemahan yang ditemukan di lapangan dalam pengelolaannya berasal dari perangkat pemerintah desa, karena mayoritas memiliki tingkat pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang masih terbilang rendah. Kompetensi perangkat desa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Masih rendahnya sumber daya manusia karena minimnya kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Mualifu (2019) adanya keterbatasan perangkat desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi membuat kurangnya pemahaman dan penguasaan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar.

Faktor lain yang memicu keberhasilan pengelolaan alokasi dana yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan untuk menyelesaikan, mengidentifikasi, dan pengambilan keputusan. Sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pada pemerintahan untuk merealisasikan kegiatan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adanya sumber daya manusia menjadi pengaruh yang besar bagi suatu kegiatan, sehingga dapat memilah kegiatan yang lebih baik untuk kedepannya dengan mengutamakan tujuan organisasi.

Keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk saling bekerjasama dengan perangkat desa. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan berfokus pada tujuan organisasi untuk kepentingan bersama (Donaldson dan Davis, 1991). Berbagai riset penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat beragam, berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa masing-

masing variabel, yaitu kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan transparansi memiliki hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten dari setiap hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu ada penelitian yang menunjukkan berpengaruh positif, dan ada juga penelitian yang menunjukkan hasil negatif.

Penelitian lain yang membahas mengenai dana desa adalah Rokhati (2020), penelitian yang diadakan di Desa Ginggangtani menemukan belum adanya transparan dan akuntabel pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya. Hal tersebut terjadi, disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pengetahuan tentang akuntansi pemerintah oleh sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelolaan.

Stewardship Theory

Grand Theory penelitian ini adalah *stewardship* teori dimana teori ini merupakan bagian dari *agency theory*. Teori *stewardship* dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991), yang menjelaskan tentang situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat dijelaskan bahwa masyarakat desa sebagai *principal* yang mempercayakan eksistensi pemerintah desa sebagai *steward* untuk mengelola dana desa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan desa. Setelah itu, pemerintah desa melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan

sesuai dengan karakteristik dari laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Untuk mencapai tujuan masyarakat, dibutuhkan adanya kompetensi, komitmen, dan transparansi.

Good Governance

Menurut Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa *good governance* adalah cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat. Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 mengatakan *Good governance* adalah suatu konsep pemerintahan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, pelayanan prima dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of development* (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui budget. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah (Kemendagri No. 114 Tahun 2014). Adisasmita (2011:23) mengatakan *Good Governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada

pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights autonomy and devolution of power and assurance of civilian control*.

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti 2004).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum ataupun pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.”

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2015, hal, 13) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup pelaksanaa, pelaksanaan, penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan desa.” Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena, para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Kompetensi Perangkat Desa

Menurut Fina (2016) menyatakan bahwa “Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia”. Menurut Cheng, Engstrom & Kattelus (2002) menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan kompetensi perangkat pemerintahan penting dilakukan serangkaian diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Serta pengalaman itu sendiri. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan.”

Partisipasi Masyarakat

Menurut Muslimin (2012: 84), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan, mengidentifikasi, dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan organisasi agar dapat memecahkan masalah yang sedang terjadi. Partisipasi masyarakat

penting, supaya kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan permasalahan yang sedang terjadi dapat diatasi, dengan memberikan peluang untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Komitmen Organisasi

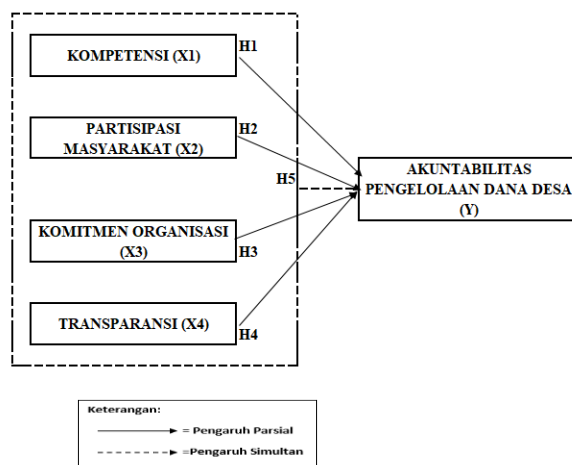
Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi merupakan keterlibatan pikiran dan emosi dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk mendorong pencapaian

Transparansi

Menurut Mulyaningsih (2019), transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang memadai, guna mendapatkan informasi yang akurat. Sedangkan menurut Adisasmitha (2011), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, yaitu masyarakat

Kerangka Penelitian

Kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada seluruh desa Kecamatan Anjir Muara Propinsi Kalimantan Selatan. Dari kajian di atas di atas, dapat diketahui lebih mudah skema kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep Pemikiran

METODA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif kausalitas. Dimana penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada seluruh desa desa yang ada di Kecamatan Anjir Muara.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang meliputi seluruh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa setidaknya terlibat dalam administrasi

keuangan desa minimal 1 tahun serta terdapat pada struktur desa yang ada di kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 60 orang dengan kriteria.

Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang diambil adalah seluruh populasi atau teknik Non Probability Sampling yaitu dengan Sampling Jenuh (sensus), yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang (Supriyanto dan Machfudz, 2010: 188), meliputi perangkat desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara yang terdapat pada organisasi desa Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 60 orang.

Tabel 1 Jumlah Perangkat Desa

No	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah
1	Desa Anjir Muara Kota	3
2	Desa Anjir Muara Kota Tengah	3
3	Desa Anjir Muara Lama	3
4	Desa Anjir Serapat	3
5	Desa Anjir Serapat Baru	3
6	Desa Anjir Serapat Lama	3
7	Desa Anjir Serapat Muara	3

8	Desa Beringin Jaya	3
9	Desa Marabahan Baru	3
10	Desa Patih Muhur	3
11	Desa Patih Muhur Baruu	3
12	Desa Sepakat Bersama	3
13	Desa Sungai Punggu	3
14	Desa Sungai Punggu Baru	3
15	Desa Anjir Serapat Muara I	3
16	Desa Sugiwaras	3
17	Desa Tiwet	3
18	Desa Tunjungmekar	3
19	Desa gambuha	3
20	Desa Kediren	3
		60 orang

Sumber: Data Desa Kecamatan Anjir Muara, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran data diawali deskripsi objek dari penelitian dan data responden. Gambaran dari objek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh pandangan yang utuh tentang objek penelitian. Deskripsi dari responden dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisisioner sebanyak 60 kuisisioner secara langsung pada pemerintahan desa yang ada di wilayah desa kecamatan Anjir Muara Kabupaten

Barito Kuala.

Waktu penyebaran kuisisioner sampai dengan selesai atau pengumpulan kuisisioner berlangsung selama 1 bulan yakni 20 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2023. Dari 60 yang telah disebarkan oleh peneliti secara keseluruhan, responden menyampaikan hasil kuisisioner dengan tingkat pengembalian 100%. Rincian data dalam penelitian ini berdasarkan jawaban kuisisioner yang diterima langsung dari masing – masing perangkat desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
Kuisisioner yang diserahkan	60	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	0	0
Kuisisioner yang diterima	60	100%
Kuisisioner yang dianalisis	60	100%

Sumber : data diolah tahun 2023

Dari data yang dapat oleh peneliti melalui jawaban kuisisioner yang tersebar di beberapa desa di kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan responden Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Untuk responden Kepala Desa sebanyak 20 responden, Sekretaris Desa sebanyak 20 responden, Bendahara Desa sebanyak 20

responden.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya dengan membandingkan nilai r

hitung dengan nilai r tabel, r hitung $>$ r tabel jika maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut dikatakan valid.

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau di ambil dari papulasi normal. Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah data yang di gunakan berdistribusi

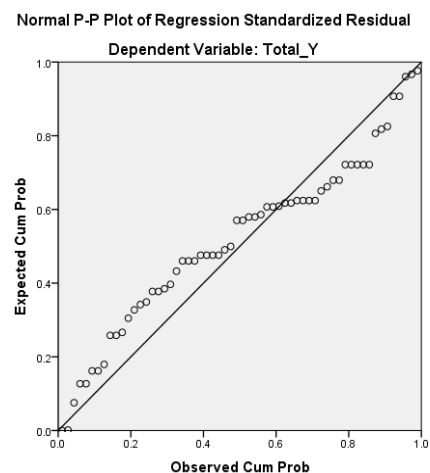
normal atau tidak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan melihat kurva normal *probability plot* dan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan Jika nilai sig. (p-value) $>$ 0,05 maka hasil normalitas terpenuhi. Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.12691918
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z		1.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P=P Plot

Berdasarkan gambar 2. Normal *probability plot* dapat diketahui bahwa sebaran titik-titik disekitar garis diagonal, yang berarti data tersebut berdistribusi normal

Uji *multikolinieritas* dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap model regresi, apakah model regresi tersebut memiliki hubungan antara variabel independen. Jika terjadi korelasi antara variabel independen, maka terdapat problem multikolinearitas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi adalah dapat dideteksi dari nilai tolerance dan lainnya serta *variance inflation factor*. Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah *tolerance* $>$ 0,10 sd nilai VIF $<$ 10.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kompetensi Perangkat Desa	0,416	2,407
Partisipasi Masyarakat	0,445	2,249
Komitmen Organisasi	0,421	2,376
Transparansi	0,297	3,368

Sumber : Data diolah tahun 2023

Dari hasil penelitian pada tabel terlihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF menunjukkan bahwa

tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan tidak

ada satu nilai *tolerance* variabel independen yang memenuhi nilai *tolerance* yaitu kurang dari 0,1, Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinearitas* antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya *multikolinearitas* dapat terpenuhi.

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)*. Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* sebagai berikut :

1. $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima,

artinya tidak terjadi autokorelasi.

2. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
3. $DL < DW < DU$ atau $4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DL dan DU dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson* dengan $n = 60$ (jumlah data) dan $k = 4$ (jumlah variabel independen), sedangkan dari tabel *Durbin-Watson* dengan signifikan 0,05 (5%). Didapat $DL = 1,4443$ dan $DU = 1,7274$, Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada output hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,964 ^a	,930	,925	1,16718	2,083

a. Predictors (Constatnt) Total_X4, Total_X2, Total_X3, Total X_4

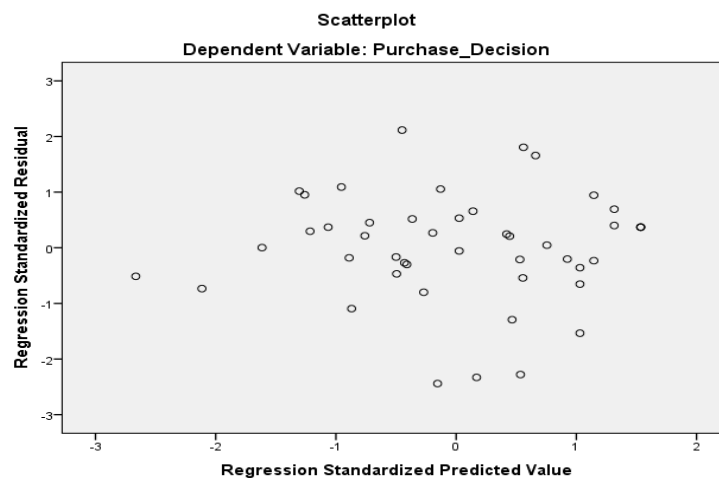
b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil ouput pada tabel 4.4 bahwa diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,,083. Karena nilai DW terletak antara $DU < DW < 4-DU$ ($1,7274 < 2,083 < 2,273$), dapat dikatakan tidak ada autokorelasi pada data penelitian, sehingga bisa dilanjutkan ke proses pengujian regresi berganda.

Pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan dengan melihat gambar *scatterplot*, bentuk regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar *scatterplot* pada Gambar 3. dapat diketahui bahwa gambar atau titik di atas menyebar dan titik tidak membentuk suatu garis atau pola tertentu. Berarti tidak terdapat *heteroskedastisitas* dalam model ini, dengan kata lain semua variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki sebaran varian yang sama atau homogen



Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan regresi linier berganda. Tujuan yaitu untuk menguji hubungan sekaligus pengaruh dari

kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std Error	t	Sig
constant	-,854	1,907	-,448	,656
Total_X1	,014	,037	,369	,713
Total X2	,419	,113	3,723	,000
Total X3	,775	,102	7,565	,000
Total X4	,521	,077	6,728	,000

Sumber : Data diolah tahun 2023

Hasil uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel secara individual (parsial) variabel-variabel independen kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) atau menguji signifikan konstanta dan variabel dependen. Dari hasil uji t yang dikemukakan pada tabel 6 maka dapat diinterpretasikan pengaruh masing-masing variabel independen kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa), sebagai berikut:

1. Berdasarkan berdasarkan hasil analisis uji t

diperoleh besarnya thitung untuk variabel kompetensi perangkat desa (X_1) sebesar 0,369 dengan $t_{tabel} = 1,67065$ maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sementara nilai signifikan variabel kompetensi perangkat desa sebesar 0,713, maka signifikansi $t_{hitung} > 0,05$, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa pertama (H_1) yang menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala ditolak.

2. Berdasarkan berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh besarnya thitung untuk variabel partisipasi masyarakat (X_2) sebesar 3,723

- dengan $t_{\text{tabel}} = 1,67065$ maka nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sementara nilai signifikan t_{hitung} variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,000, maka signifikansi $t_{\text{hitung}} < 0,05$, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa kedua (H_2) yang menyatakan partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala diterima
3. Berdasarkan berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh besarnya t_{hitung} untuk variabel komitmen organisasi (X_3) sebesar 7,565 dengan $t_{\text{tabel}} = 1,67065$ maka nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sementara nilai signifikan t_{hitung} variabel komitmen organisasi sebesar 0,000, maka signifikansi $t_{\text{hitung}} < 0,05$, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa ketiga (H_3) yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala diterima
 4. Berdasarkan berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh besarnya t_{hitung} untuk variabel transparansi (X_4) sebesar 6,728 dengan $t_{\text{tabel}} = 1,67065$ maka nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ sementara nilai signifikan t_{hitung} variabel transparansi sebesar 0,000, maka signifikansi $t_{\text{hitung}} < 0,05$, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa keempat (H_4) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala diterima

Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya *Adjusted R square* (R^2) adalah 0,925. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi secara bersama sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 92,5%,

keterpengaruh variabel kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi dikatakan sangat tinggi karena hampir mendekati 100%, sedangkan sisanya 7,5% nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ditolak. Hal ini berdasarkan uji signifikansi (uji t) variabel kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa nilai $t_{\text{hitung}} 0,369 <$ dari nilai $t_{\text{tabel}} 1,6706$ serta dari nilai signifikansi $0,713 > 0,05$ yang lebih besar, sehingga H_1 ditolak

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan masyarakat harus memiliki kecakapan, keahlian tugas untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa dapat menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan kemampuan petugas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tidak berpengaruhnya faktor kompetensi aparat desa dikecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala juga disebabkan tingkat pendidikan yang sebagian besar tamatan SLTA, sehingga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pengembangan SDM, kecakapan dan keahlian dari perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang masih rendah.

Penelitian ini mendukung penelitian Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi dan, Herman Karamoy tahun 2017 yang meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian ini juga menolak penelitian oleh Ferina, Burhanuddin, & Lubis (2016) dan penelitian Khimayah (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Prasetyo (2018).

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh besarnya thitung untuk variabel partisipasi masyarakat sebesar 3,723 dengan ttabel = 1,67065 maka nilai thitung > ttabel sementara nilai signifikan thitung variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,000, maka signifikansi thitung < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa kedua (H_2) yang menyatakan partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala diterima. Dari penjelasan diatas menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian ini selaras dengan konsep akuntabilitas menurut Agrawal dan Ribot (1999:477) yang mengatakan bahwa semua model akuntabilitas adalah bersifat hubungan. Pada dasarnya terdapat aktor (pemerintah) dan konstituen (masyarakat). Agar pemerintah tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya, maka masyarakat seharusnya datang meminta pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga pelaksanaan desentralisasi akan lebih akuntabel.

Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian Zeyn (2011) bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Rahmanurrasjid (2008:6) mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam

pertanggungjawaban pemerintah daerah bisa terwujud dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian yang selaras dengan penelitian ini adalah oleh Mamello (2016, Karimah (2014), Fajri (2015), Riyanto (2015), Makalalag (2017), Arifiyanto (2017), dan Aziz (2016), tetapi penelitian ini juga menolak penelitian yang dilakukan Siti Nurhayati Nafsiah dan Mei Diana Tahin 2020, yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Indralaya.

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh besarnya thitung untuk variabel komitmen organisasi sebesar 7,565 dengan ttabel = 1,67065 maka nilai thitung > ttabel sementara nilai signifikan thitung variabel komitmen organisasi sebesar 0,000, maka signifikansi thitung < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa ketiga (H_3) yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala diterima.

Komitmen organisasi merupakan suatu tindakan yang mencerminkan seseorang, untuk mengenal dan terikat pada organisasi. Apabila terdapat rasa senang dan nyaman yang timbul dari seseorang tanpa ada tekanan dan beban saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari atasannya. Hasil pengujian ini selaras dengan konsep akuntabilitas yang dikembangkan oleh Cavoukian et al. Cavoukian et al (2010:409) mengemukakan terdapat lima elemen penting dari akuntabilitas adalah: (1). Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan penerapan kebijakan internal yang konsisten dengan kriteria eksternal, (2). Mekanisme untuk menerapkan kebijakan privasi, termasuk alat, pelatihan, dan pendidikan, (3). Sistem untuk pemeriksaan pengawasan dan penjaminan internal dan eksternal, (4). Transparansi dan mekanisme untuk partisipasi individu, dan (5). Sarana untuk remediasi dan penegakan

eksternal. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi, komitmen orang-orang dalam organisasi menjadi penting.

Zeyn (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan. Penelitian ini juga menolak penelitian yang dilakukan Nila Nur Kholifa pada tahun 2020, yang meneliti komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Rembang dan Kecamatan Sumber

Berdasarkan berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh besarnya thitung untuk variabel transparansi sebesar 6,728 dengan ttabel = 1,67065 maka nilai thitung > ttabel sementara nilai signifikan thitung variabel transparansi sebesar 0,000, maka signifikansi thitung < 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesa keempat (H_4) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala diterima.

Dalam penelitian ini transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka akan semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sebaliknya. Penelitian sejalan dengan teori *Stewardship theory* menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan berfokus pada tujuan organisasi untuk kepentingan bersama (Donaldson dan Davis, 1991).

Menurut Mariska, dkk. (2018), perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawabnya

masing-masing, agar dapat terlaksana dengan baik maka harus memiliki transparansi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dalam organisasi dan harus memiliki komitmen organisasi untuk saling bekerjasama supaya mencapai tujuan. Semakin baik transparansi yang dimiliki oleh perangkat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka akan semakin baik pula pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini bisa dilihat dari proses keterbukaan anggaran sampai dengan penggunaan atas pengelolaan dana desa yang melibatkan partisipasi masyarakat desa. Penelitian ini menolak penelitian dari Francisca Silvia Rossalyn Pravitasari tahun 2021, dimana pada penelitiannya transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori lain yang mendukung penelitian ini adalah *Good Governance Theory*, yang secara umum dikaitkan dengan pemerintah yang bersih (*clean government*) serta berwibawa. dimana faktor kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan transparansi secara bersama sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa di kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini lebih disebabkan pada sebagian besar perangkat desa berpendidikan SLTA. sehingga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pengembangan SDM, kecakapan dan keahlian dari perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang masih rendah di kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala,
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif

secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa Desa di kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala. Artinya untuk menciptakan *Good Governance* diperlukan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan kontribusinya dalam penyusunan APBDes. Dengan adanya kontribusi atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes maka akan semakin terarah dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat aktif dalam menggerakkan program kegiatan pembangunan desa diseluruh kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala.

3. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan bahwa komitmen yang tinggi akan mendorong kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dikarenakan apabila seorang perangkat desa memiliki rasa terhadap organisasi yang dijalankannya dia akan bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan didalam organisasi tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong keberhasilan dalam mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel sesuai dengan tujuan organisasi tersebut
4. Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sudah sangat baik, yang meliputi penyediaan akses informasi, musyawarah, keterbukaan pengelolaan, dan keterbukaan dokumen. Transparansi yang sangat baik akan memberikankontribusi yang signifikan dalam mendorong akuntabilitas

pengelolaan dana desa di kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi perangkat desa penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa, dari segi pemahaman akan siklus administrasi serta akuntansi dalam pengelolaan dana desa, perangkat desa dapat menghasilkan laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Perangkat desa hendaknya dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen dan memilih mediator dengan variabel lain yang dapat memediasi secara signifikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Bagi pemerintah desa di kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala, penelitian ini dapat dijadikan usulan agar pemerintah kabupaten Barito Kuala mengadakan sosialisasi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam mengelola alokasi dana desa.

REFERENCES:

- Afrijal. 2018. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus)*. Universitas Mitra Indonesia
- .Agustini, N. L. P. A., Widia, N. K. A. W., & Kumalawati, N. N. D. D. K. 2019. Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(3).
- Ahmad, A. A. 2017. *Kinerja Pemerintahan Desa Sebagai Penyedia Pelayanan Publik Di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*.
- Allen, N.J. and Meyer, J.P. 1990. *The Measurement and Antecedents Affective, Continuance and Normative Commitment. Journal of Occupational Psychology*.
- Ananda, F. P. 2018. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal , Transparansi Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi*.
- Andi Putu 2017 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2)
- Andriani, U., & Zulaika, T. 2019. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Arifiyanto Febri Dwi 2014 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 473-485.
- Astuti, R. M. 2013. *Meriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Grobogan*, 1–13.
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. 2019. *The Effect of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. Scientific Research Journal (Scirj)*, Vii(1), 10–20. <https://doi.org/10.31364/Scirj/V7.11.2019.P0119599>
- Dura Jusita 2016 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 10(1) Agustus, 26-32.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(6), 321–336.
- Fitri. 2015. *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 180–192.
- Gayatri, & Dewi, N. K. A. J. P. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298.
- Hardiningsih, P., O, R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. 2019. *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang)*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21–42.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. 2020. *Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.
- Herdiansah, A. G. 2016. Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Ismail Muhammad. 2016, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(11).
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. 2018. *The Influence of Human Resources, Use of Information Technology And Public Participation To The Transparency And Accountability of Village Financial Management. International Journal of Scientific Research And Management (Ijsrm)*, 06(05), 373–385. <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V6i5.Em03>.

